

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus - menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peranan masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan aturan terbaru hasil revisi dari Permendagri No. 29 Tahun 2002 menyatakan bahwa bagian pendapatan daerah dikelompokkan atas 3 bagian yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kedua, yaitu dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selanjutnya yaitu lain-lain pendapatan yang sah. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah mengambil langkah-langkah atau tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu sumber pendapatannya adalah pajak daerah.

Menurut Kesit (2005) mengatakan bahwa "Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peranan penting dalam meningkatkan penerimaan di samping pajak pemerintahan pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota diatur oleh Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pajak Provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Selanjutnya, Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 definisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut: "Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air." Sekarang ini pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan kendaraan umum dalam menjalankan aktivitasnya, dan juga banyak

masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan.

Seiring meningkatnya jumlah kendaraan semakin banyak pula masyarakat yang kurang memahami bagaimana prosedur pembayaran dan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Untuk dapat melaksanakan proses penerimaan pajak kendaraan bermotor ini, proses tersebut didukung dengan adanya sistem pengendalian internal, di mana dalam kepatuhan masyarakat tidak hanya berbicara tentang peran yang penting dari dinas pendapatan tetapi proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor berkaitan dengan sistem pengendalian internal. Agar proses penerimaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor akan terlaksana dengan baik. Dalam sistem pengendalian internal ini juga terdapat beberapa komponen yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang bertugas memudahkan Masyarakat dalam mengurus pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) dan Pembayaran Sumbangan Wajib dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLL). Dengan penjelasan dan memperhatikan alasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan memabahas judul yang berkaitan dengan : “Tinjauan Sistem Pengendalian Internal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK Pada SAMSAT Kota Padang”

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sistem pengendalian internal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan STNK pada Samsat Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memiliki maksud, yaitu: penulis ingin mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan STNK pada Samsat Kota Padang dengan menjelaskan komponen - komponen apa yang digunakan.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat bagi penulis

- a. Mempertinggi pandangan dan pemahaman dibidang sistem pengendalian internal
- b. Mengatasi pertanyaan-pertanyaan ketidaktahuan penulis mengenai Sistem Pengendalian Internal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK pada Samsat Kota Padang

1.4.2 Manfaat bagi akademik

Menambah kepustakaan dan memberikan masukan khususnya mengenai Sistem Pengendalian Internal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK pada Samsat Kota Padang.

1.4.3 Manfaat bagi Instansi

Sebagai informasi yang bias dimanfaatkan sebagai pertimbangan oleh instansi, serta diharapkan dapat menghasilkan kontribusi dalam mewariskan mimik transparan sistem pengendalian internal.

1.5 Metode Penulisan

a. Wawancara

Mengadakan proses tanya jawab secara langsung dilakukan dengan staff yang berhubungan dengan sistem pengendalian internal pembayaran pajak kendaraan bermotor dan STNK.

b. Observasi

Mengadakan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan sehubungan dengan penulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan secara garis besar Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tempat dan Waktu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Menjelaskan Sistem Pengendalian internal, menjelaskan tentang pajak daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

BAB III : GAMBARAN UMUM SAMSAT KOTA PADANG

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Gambaran umum Kantor Samsat Kota Padang mengenai dasar hukum pembentukan Kantor Samsat Kota Padang, visi misi tujuan dan sasaran tugas pokok fungsi dan kewenangan dan struktur organisasi Kantor Samsat Kota Padang

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang penguraian tentang kajian yang lebih mendalam dari hasil pembahasan yang ditemukan tentang Sistem Pengendalian Internal Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan STNK pada Samsat Kota Padang

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan, saran-saran yang sesuai dalam pemaparan suatu kesimpulan beserta keterbatasan yang dipaparkan oleh penulis.

